

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah sebuah usaha yang dilakukan dalam membuat suatu penelitian dengan mencari perbandingan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan gagasan baru dalam melakukan penelitian selanjutnya oleh penulis. Penelitian terdahulu yang pernah dibuat merupakan bisa menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya, hal ini dilakukan guna memperkaya teori dalam mengkaji suatu penelitian yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan tema serupa yang pernah dibuat serta terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan mencantumkan hasil-hasil beberapa penelitian terdahulu yang pernah dibuat, sebagai berikut:

Yang pertama, Ratika Sharma dalam penelitiannya yang memiliki judul *“Gender Inequality in India: Causes and Remedies”*¹ yang memberikan pembahasan terkait ketidaksetaraan gender yang dicerminkan pada realitas hidup keseharian perempuan dan anak perempuan, termasuk kuantitas perempuan yang hidup dalam kemiskinan yang tidak proporsional. Meskipun dipuja sebagai dewi di India, perempuan seringkali tidak memiliki hak asasi manusia. Mereka diposisikan sebagai kelompok yang terbelakang serta sebagai warga negara yang berada pada kelas dua. India dianggap sebagai negara yang memiliki penghasilan yang menengah oleh orang Amerika. Menurut temuan Forum Ekonomi Dunia, India berada di antara negara-negara

¹ Sharma, R. (2015). Gender Inequality in India: Causes and Remedies. Research Journal of Management Sociology & Humanity (IRJMESH), 6(8), 142–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.32804/IRJMESH>

terburuk terkait dengan ketidaksetaraan gender. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder dari surat kabar serta beberapa organisasi yang sah. Ketidaksetaraan gender yang meluas di India adalah subjek dari penyelidikan ini. Studi ini juga akan menawarkan beberapa saran untuk meningkatkan status perempuan dalam masyarakat India.

Selanjutnya, penelitian Dr. E. Raju, M.A., M.Phil., Ph.D yang memiliki judul "*Gender Discrimination in India*"² yang menjelaskan terkait keadaan India lepas adanya kemerdekaan di negara tersebut. Gender merupakan bagian isu yang menjadi fokus para *policy maker* di lingkungan yang berkembang sejak kemerdekaan. Perdebatan kebijakan sekarang berpusat pada isu-isu gender. Pada konteks pandangan tentang kebijakan ekonomi baru serta hubungan gender, dianggap bahwa isu kesetaraan dan keadilan gender memperoleh signifikansi tambahan. Strategi negara dalam mengakhiri kemiskinan serta permasalahan perempuan termasuk memastikan kesetaraan gender. Karena perempuan dapat membawa ide dan energi segar ke India, setiap pembuat kebijakan begitu yakin bila komitmen yang positif pada kesetaraan gender bisa menguatkan setiap bidang upaya pengentasan kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Raju ialah bahwa penelitian ini pun akan berbicara tentang tugas pemerintah di dalam penegakan CEDAW untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di India, khususnya diskriminasi mahar. Penelitian Raju menjelaskan bagaimana perempuan didiskriminasi di India dan bagaimana kesetaraan gender merupakan bagian dari rencana negara untuk mengakhiri kemiskinan dan penderitaan perempuan.

² Raju, E. (2014). Gender Discrimination in India. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 2(5), 55–65. <http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/vol2- issue5/H0255565.pdf>

Dan yang terakhir, Priti Jha dan Niti Nagar dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*A Study of Gender Inequality in India*”³, memperhitungkan kesenjangan gender yang ada di semua wilayah dan kelas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi India untuk meningkatkan kehidupan orang India. Ketidaksetaraan gender adalah realitas yang sangat kompleks dan multifaset di India karena ada di setiap bidang, termasuk pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan, kesehatan, masalah budaya, masalah ekonomi, dan sebagainya. Di India, upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab masalah ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, konteks multifaset dari ketidaksetaraan gender yang meluas di India diterangi oleh penelitian ini. Ketimpangan bias ekonomi, sosial, budaya, dan hukum lebih baik dijelaskan oleh penelitian ini secara keseluruhan, yang memudahkan pembuat kebijakan dan ilmuwan sosial untuk menciptakan persamaan hak di semua bidang sosial. Dalam upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan antara jenis kelamin dan memajukan posisi yang bermartabat bagi perempuan India, para peneliti telah mencoba untuk menyarankan beberapa strategi dan implikasi kebijakan yang relevan.

Penelitian ini secara keseluruhan lebih baik memberikan penjelasan bias hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, yang memudahkan pembuat kebijakan serta ilmuwan sosial dalam mencapai persamaan hak di semua bidang sosial. Para peneliti telah berusaha untuk memberikan saran beberapa strategi serta implikasi kebijakan terkait dalam upaya dalam pengurangan ketidaksetaraan gender dan memajukan posisi yang bermartabat bagi perempuan India. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jha dan Nagar adalah penelitian ini lebih fokus pada peran pemerintah dalam penegakan CEDAW untuk memerangi diskriminasi terhadap perempuan di India, khususnya diskriminasi mas kawin.

³ Jha, P., & Nagar, N. (2015). A Study of Gender Inequality in India. *The International Journal of Indian Psychology*, 2(3), 46–57. <https://doi.org/10.25215/0203.045>

2.2 Pengertian dari Kajian Kepustakaan

2.2.1 Feminisme

Teori ini berdasarkan pada *revolutionary movement* yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.⁴ Istilah ini berasal dari tahun 1980-an sebagai referensi untuk teori kesetaraan gender. Landasan munculnya feminisme dalam sejarahnya adalah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, hingga pada akhirnya akan ada kesadaran serta usaha dalam memusnahkan ketimpangan tersebut. Sebagai gerakan politik, feminisme berakar pada apa yang dikenal sebagai gerakan hak pilih di berbagai negara barat pada akhir abad 19. Gerakan ini bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan baik dari segi kondisi kehidupan, status sosial maupun perannya dalam kehidupan social.⁵ Kemunculan perempuan modern dan kontemporer yang mulai mengintervensi berbagai aspek kehidupan, termasuk keikutsertaannya dalam kegiatan militer dan ekonomi global, dimana salah satu keberhasilannya adalah gerakan hak pilih perempuan di Inggris, menjadi pendorong berkembangnya feminisme. serta Amerika Serikat.⁶ Selain menekankan pada isu peran gender, asumsi utama lain yang dibuat oleh feminis ialah usaha melakukan pengembangan emansipasi perempuan melalui penghapusan ketidaksetaraan gender yang disebabkan akibat budaya patriarki. Saat ini feminisme dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: Pertama, feminisme liberal, yang berpandangan bahwa kebebasan dan kesetaraan bersumber dari rasionalitas, sehingga perempuan harus diberdayakan seperti halnya laki-laki. Feminis liberal juga menyangkal bahwa laki-laki dan perempuan pada

⁴ Hidayati, N. (2018). Teori feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Ke-Islaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21–29. <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10403>

⁵ Sadli, S. (2010). *Berbeda tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Penerbit Buku Kompas

⁶ Burchill, S., & Linklater, A. (2011). *Teori-teori Hubungan Internasional* (M. Sobirin (Trans.)). Penerbit Nusa Media.

umumnya setara, dan perempuan juga memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara mereka bereproduksi. Kedua, feminisme radikal, yang muncul sebagai tanggapan terhadap seksisme Barat pada tahun 1960-an, berpendapat bahwa laki-laki dan ideologi patriarki harus disalahkan atas penindasan perempuan. Dominasi fisik laki-laki atas perempuan merupakan bentuk penindasan. Feminis radikal berpendapat bahwa budaya patriarki dalam masyarakatlah yang mendiskriminasi perempuan dibandingkan laki-laki. Ketiga, feminisme Marxis, yang berpandangan jika ide-ide biologis tidak layak digunakan sebagai acuan analisis dalam memberikan penentuan apakah perempuan dan laki-laki dapat memenangkan kesempatan yang lebih baik di dalam kehidupan sebagaimana mestinya. Analisis aliran ini didasarkan pada keyakinan Engels bahwa kemajuan teknologi bukanlah penyebab penurunan status perempuan. Mazhab ini berpendapat bahwa laki-laki dianggap bertanggung jawab atas hubungan sosial dan ekonomi. Keempat, feminisme sosialis muncul sebagai respon terhadap metode sejarah materialis Marx dan Engels dan disesuaikan dengan politik radikal. Revolusi sosialis yang dilakukan di Rusia, Cina, dan negara-negara lain tidak mengangkat status perempuan yang selalu lebih rendah dari laki-laki. Mereka menolak pandangan kaum Marxis klasik yang berpendapat bahwa perempuan didiskriminasi karena status ekonomi mereka.⁷

2.2.2 Konstruktivisme

Teori ini terfokus pada peran institusi, norma, budaya, dan identitas di dalam meneliti suatu fenomena hubungan internasional. Konstruktivisme sebagai bagian dari teori post-positivism memberikan beberapa pilihan lain bagi para scholar dalam mengkaji fenomena internasional dari perspektif yang berbeda dan menyumbangkan kontribusi berharga bagi kemajuan studi

⁷ Shiva, V. (Ed.). (1997). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan dan Perjuangan Hidup di India* (H. Jhamtani, Trans.). Yayasan Obor Indonesia & KONPHALINDO.

Hubungan Internasional. Sebenarnya, konstruktivisme merupakan perspektif yang tercipta dari sosiologi. Perspektif ini tidak benar-benar lahir dari ilmu Hubungan Internasional. Perspektif konstruktivisme diambil ke dalam ilmu Hubungan Internasional karena dinilai memiliki beberapa poin penting yang bisa menceritakan beberapa aspek politik dunia⁸. Konstruktivisme menentang positivism yang mengklaim bahwa fenomena HI harus diteliti melalui ilmu pasti saja. Positivism terlalu melihat fenomena HI sebagai sesuatu yang saintifik. Menurut kaum konstruktivis, fenomena HI terjadi melalui norma, nilai, dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Perilaku sosial yang berkembang di masyarakat itulah yang membangun perpolitikan dunia. Dari sini dapat dilihat bahwa konstruktivisme merupakan bagian dari post-positivism dan bukan positivism seperti teori-teori sebelumnya⁹

Penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme lebih khususnya untuk menganalisis mengenai meratifikasi CEDAW. Konstruktivis menempatkan penekanan kuat pada aspek non-materi dari tindakan seorang aktor, yang sering diabaikan tetapi secara signifikan mempengaruhi mereka. Menurut konstruktivis, fenomena sosial seperti norma, aturan, bahasa, budaya, dan ideologi membentuk identitas dan perilaku langsung. Konstruktivisme juga meyakini adanya pengaruh identitas dan norma kedalam dunia politik untuk mempengaruhi cara aktor mendefinisikan kepentingan (Katzenstein, 1996). Norma yang diyakini oleh konstruktivis terdapat dari dua sumber yakni internasional dan domestik. Pengaplikasian norma kesetiap negara juga tidak akan sama, hal ini dikarenakan konstruktivis percaya adanya pengaruh domestik yang kuat. Oleh karena itu Penelitian ini akan mencoba menganalisis dampak domestik tersebut dengan melakukan pengamatan Bagaimana norma

⁸ Reus-Smith Christian, "Constructivism, in; Scott Burchill, et al, Theories of International Relations", (London, Palgrave, 2001, hlm. 7)

⁹ Ibid

internasional berbeda dari satu negara ke negara lain, dan kemudian berasumsi bahwa faktor domestik menentukan kebijakan negara mana yang dipengaruhi secara berbeda. Melalui pandangan konstruktivis, mengenai hal tersebut tidak ada yang sifatnya secara universal ataupun otomatis. Maka, konstruktivisme tidak hanya melihat norma-norma yang hadir di lingkungan internasional saja tetapi juga menekankan pentingnya norma di lingkungan domestik sebagai salah satu faktor yang penting dalam membentuk kebijakan luar negeri pada suatu negara.¹⁰

2.2.3 Konsep Kerja Sama Internasional

Fokus dari konsep hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan

¹⁰ Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics*. Columbia: Columbia University Press.

kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam konsep kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusioanal yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional. Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Konsep kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan

internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan.

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.¹¹

Terkait dengan pembahasan diatas, UN Women sebagai Organisasi Internasional yang fokusnya dalam isu-isu perempuan. Menaungi kurang lebih 168 negara termasuk India bekerja sama dalam mendukung seluruh program yang ditawarkan UN Women demi terwujudnya kesetaraan perempuan di seluruh dunia. India bekerja sama dengan UN Women menjadi penting karena isu kekerasan adalah hal yang krusial di India dan menjadi negara dengan tingkat kekerasan tertinggi

¹¹ <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo-16408-3-9-bab-b.pdf>

di dunia. Kerjasama India dan UN Women telah terjalin sejak lama yakni sejak ratifikasi perjanjian Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW 1993). Kerjasama pemerintah India dan UN Women kemudian dilanjutkan dengan beberapa program yang ditawarkan oleh UN Women kemudian dilanjutkan dengan beberapa program yang ditawarkan oleh UN Women itu sendiri dan terus dijalankan sampai saat ini.



2.3 Kerangka Berpikir



